

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Efisiensi ini merupakan pencarian cara terbaik agar tujuan dapat tercapai adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan yang menggunakan sumber daya minimal namun hasil yang diperoleh maksimal. Dimana sumber daya harus diolah secara bijak dan juga hemat sehingga tenaga, waktu, dan juga uang pun tidak terbuang sia-sia.

Efektivitas merupakan sebuah usaha yang mana untuk bisa memperoleh sebuah hasil, target, sesuai dengan waktu yang ditentukan terlebih dahulu. Umumnya, efektif ini akan berhubungan erat dengan sebuah perencanaan kemudian penjadwalan hingga pelaksanaan tujuan. Suatu pekerjaan pun, bisa dikatakan berjalan dengan efektif apabila tujuan yang sudah ditetapkan memang telah mencapai keberhasilan.

Efektivitas sendiri merupakan cara dalam mencapai sebuah tujuan dengan menggunakan cara-cara yang benar kemudian diimplementasikan dalam sebuah pekerjaan agar hasil yang diperoleh tepat waktu.

Perbedaan efisiensi dan efektivitas

1. Efisiensi

- Berorientasi untuk tujuan
- Untuk bisa mencapai tujuan menggunakan cara yang hemat
- Dalam waktu pengerjaannya jauh lebih lama dikarenakan sumber daya yang ada telah dipangkas

- Sangat hemat biaya

2. Efektivitas

- Memang berorientasi untuk tujuan
- Mencapai tujuan menggunakan cara yang tercepat
- Untuk waktu pengerjaannya jauh lebih singkat dikarenakan ketersediaan sumber daya dan lain-lain telah terpenuhi.
- Untuk biaya di keluarkan juga cukup tinggi.

Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah Menurut (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran secara ekonomi serta adanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan anggaran dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti penggunaan anggaran harus dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value forney*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan penggunaan sumberdaya alam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah efisiensi bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal

(berdaya guna) efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target –target atau tujuan kepentingan publik. pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masi memperhatikan. Anggran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagaai insentif dalam mendorong laju pempaangunan di daerah. Disisi lain banyak di temukan pengalolasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas dan kurang mencermikan aspek ekonomi efesien, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah realatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidak mampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah sudah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan *underfinanci* atau *overfinancing* pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonomi efesiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah daerah (Mahmudi: 2009:9). Anggaran dan pendapatan belanja daerah merupakan rencana keuangan keuangan tahunan perintahan daerah yang dibahas dan distujui bersama oleh perintah daerah dan sdewan perwakilan rakyat daerah dan di tetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemrintah daerah, maka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapt dinilai dengan termasuk di dalamnya segala bentuk +kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, azas kepatutan, dan azas manfaat bagi masyarakat di suatu daerah.

Pemerintah harus melaksanakan optimalisasi anggaran dalam rangka mempertanggung jawaban publik yang dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisien merupakan pemaksimalan output yang di hasilkan dengan menggunakan cara yang tepat agar program yang direncanakan dapat dapat terlaksanakan dengan tepat sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keefisiensian dapat tercapai apabila input yang masuk digunakan dengan seminimal mungkinan output yang di hasilkan melebihi target yang di tetapkan merupakan suatu rumus yang digunakan untuk menilai selisih antara. (Maharani,2018). Keefisiensian keuang daerah dapat dilihat melalui hasil perhitungan rasio efesiensi. Sudaryono et.al (2017) menjelaskan bahwa rasio efesiensi otal realisasi belanja yang

digunakan oleh daerah dengan total realisasi pendapatan yang di terima oleh daerah agar selisih dari realisasi belanja daerah dan pendapatan daerah tersebut dapat tergambar dengan jelas.”” Efektif merupakan tingkat keberhasilan pencapaian program dari sasaran target yang di tetapkan (Muflihani ,2018).

Keefektifan keuangan daerah dapat dilihat melalui hasil perhitungan rasio efektivitas .Sudaryono e.al (2017) menjelaskan bahwa“ rasio efektivitas merupakan suatu rumus yang digunakan untuk mengukur kekuatan daerah dalam mengaktualisasi pendapatan daerah yang diagendakan dengan target yang ditetapkan berdasarakan potensi riil daerah agar seberapa besarnya tingkat kemampuan daerah tergambar dengan jelas.”Rasio efesiensi dan rasio efektivitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah.keuangan daerah dianalisis agar masalah-masalah dan peluang terhadap aktivitas keuangan dapat terselidiki secara detail.penganalisaan mengenai keuangan daerah dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu menganalisaan terhadap penerimaan daerah dan menganalisaan terhadapap belanja.

Penganalisaan terhadap penerimaan daerah merupakan suatu usaha pengamatan kinerja keuangan daerah yang mengacu pada aktualisasi pendapatan dan perkiraan pendapatan. Sedangkan menganalisaan terhadap belanja daerah merupakan suatu usaha pengamatan kinerja keuangan daerah yang mengacu pada penggunaan APBD (Pramita, 2015) Tingkat efesien dan efektif keuangan daerah dapat dilihat melalui kriteria yang telah di tetapkan sebelumnya. Keuangan dikatakan efesien apabila peresentase dari hasil perhitungan rasio efesiensi berada di bawah 60% namun apabila presentase tersebut lebih dari 100% maka keuangan

daerah dapat dikatakan sangat tidak efisien berbeda dengan efektivitas keuangan daerah. Keuangan daerah dapat dikatakan efisien apabila presentase dari hasil perhitungan rasio berada di atas 100% namun apabila presentase tersebut di bawah 60% maka keuangan daerah dikatakan sangat tidak efektif. Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kabupaten kupang selalu dibawah pertumbuhan provinsi nusa tenggara timur hal ini bisa dimengerti karena perekonomian Nusa Tenggara Timur di dominasi sektor industri sedangkan perekonomian kabupaten kupang di dominasi pertanian, dimana pada umumnya pertumbuhan sektor industri akan lebih cepat dibanding sektor pertanian.

Sesuai RPJMD Kabupaten kupang tahun 2017-2019 dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan di kabupaten kupang maka prioritas pembangunan kabupaten kupang tahun 2019 diarahkan 9 kebijakan sebagai berikut; (i) pengetasan dan kemiskinan dan kesengjangan; (ii) pembangunan pertanian; (iii) pembagunan kehutanan; (iv) pembangunan sosial ekonomi; (v) pembagunan pendidikan; (vi) pembagunan kesehatan; (vii) pembangunan serana dan praserana wilayah- wilayah; (viii) peningkatan penyelenggaraan pemerintah; (ix) pembagunan kehidupan beragama.

Tabel 1.1. Target Dan Realisasi Pendapatan Dan BelanjaKabupaten Kupang

Tahun 2017- 2019

Tahun	Target pendapatan	Target belanja	Hasil %
2017	1.141.043.758.854,62	1.026.337.555.210,00	89,94
2018	1.23.6846.999.491,25	1.015.776.727.803,00	82,12
2019	241.876.621.413,00	2.000.000.000,00	82,68

Sumber: *DPPKA kabupaten kupang laporan realisasi APBD 2017- 2019 (Hitung ulang).*

Dari data pada Tabel 1 di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan dan realisasi belanja secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dana alokasi sumber daya, sementara arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan dan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan

bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pertanggung jawaban publik pemerintah daerah wajib melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis keuangan merupakan suatu usaha untuk mengetahui dan menjabarkan ciri-ciri berdasarkan laporan keuangan yang telah tersedia. Salah satu alat ukur dan media yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Kajian empiris mengenai kinerja keuangan serta kemampuan keuangan daerah di Indonesia selama ini telah banyak dilakukan, di antaranya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah di kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan kecenderungan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sudah pernah dilakukan. Rondonuwu dkk, (2015) meneliti tentang analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di pada dinas pendapatan daerah di kabupaten Minahasa selama kurang waktu lima tahun. Dalam hal kestabilan tidak konsisten tingkat efektivitas tiap tahunnya, sedangkan dalam hal tingkat efisiensi yang di kategorikan kurang efisien, didapatkan hampir stabil dan konsisten. Penelitian Santoso (2011) Tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Ngawi masih rendah dan tingkat

efektivitas sudah efektif. Penelitian yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas telah ada sebelumnya seperti penelitian dari Rondonuwu, Tinangon, Budiarmo (2016) yang menjelaskan bahwa efektivitas keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Dispenda kabupaten Minahasa pada tahun 2010-2014 berada pada tingkat sangat efektif namun tingkat efisiensinya berada pada tingkat kurang efisien yang disebabkan oleh penggunaan anggaran lebih besar dari penerimaan sehingga pengeluaran daerah lebih tinggi penerimaan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Manopo dkk (2015) menyatakan kesimpulan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Minahasa utara kurang efisien tetapi efektivitas pengelolaan keuangan daerah masuk pada kriteria sangat efektif. Selanjutnya peneliti Vera dkk (2015) menyatakan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Minahasa utara rata-rata di atas 75% dan efektivitas kerjanya mencapai angka rata-rata 90%. Alasan peneliti memilih keuangan daerah di kabupaten Kupang sebagai bahan penelitian karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat APBD yang telah dilaksanakan di kabupaten Kupang. Alasan lain peneliti memilih keuangan daerah sebagai bahan penelitian adalah tersedianya bahan literatur yang memadai sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang sama dilakukan kembali. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pemilihan Kabupaten Kupang menjadi tempat penelitian didasarkan karena kabupaten ini adalah salah satu kabupaten yang terus meningkat aparatur daerahnya dan cenderung mengalami

peningkatan APBD setiap tahunnya sektor industri pariwisata, pertanian, dan pembangunan infrastruktur, kehutanan dan lain serta retribusi pajak daerah di kabupaten ini selalu diharapkan meningkat agar PAD terus mengalami peningkatan serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat agar mampu meningkatkan otonomi dan keleluasan daerah. Sehingga penelitian ingin mengetahui seberapa besar tingkat APBD yang telah dilaksanakan di kabupaten Kupang. Alasan lain peneliti memilih keuangan daerah di kabupaten karena tersedianya bahan literatur yang memadai sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban terhadap publik yang merupakan *stakeholder* perlu menjadi perhatian khusus agar dana yang ada digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah berapa besarnya tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintah kabupaten Kupang pada era ekonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang maka dari itu peneliti mengambil judul **“Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kupang”**

1.2. Masalah Penelitian

Latar Belakang Di Atas Maka Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Berdasarkan Keuangan Daerah Di Kabupaten kupang”

1.3 Persoalan Penelitian

- a. Berapa besarnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten kupang. Pada tahun 2017 samapai dengan tahun 2019.
- b. Berapa besarnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada di kabupaten kupang. Pada tahun 2017 samapai dengan tahun 2019 .

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Ujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten kupang selama 2017-2019
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten kupang. Selama tahun 2017- 2019

1.4.2. manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait sebagai berikut :

A. Manfaat Akademis.

Di harapkan penelitian ini dapat membawa keputusan dan sumbungan ilmiah bagi Ilmu Universitas Kristen Artha Wacana Kupang umumnya fakultas ekonomi.

B. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat Kabupaten Kupang dalam hal ini terkait menata semua aspek pendukung demi kesejahteraan bersama. Selain itu juga kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian pada obyek yang sama, Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan Ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.